

ANALISIS NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MAROKO DAN ISRAEL PADA TAHUN 2020

Oleh : Diffa Anindra Pratama
Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa Maroko menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel pada tahun 2020. Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh Amerika Serikat tersebut telah memberikan Maroko keuntungan strategis dalam aspek geopolitik, militer, ekonomi, dan lainnya. Disisi lain, langkah Maroko tersebut menjadi topik kontroversial, karena berkaitan dengan historis konflik dan dinamika politik negara-negara Arab yang kontra terhadap Israel. Kesepakatan normalisasi Maroko dengan Israel meminta kedua negara untuk membuka akses kontak secara resmi dan melanjutkan hubungan diplomatik

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, laporan, website, dan skripsi. Penelitian ini menggunakan perspektif Behavioralisme dan teori pengambilan keputusan (*decision makers*).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kesepakatan normalisasi antara Maroko dan Israel merupakan kebijakan rasional Maroko untuk mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya mengenai persoalan Sahara Barat. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk tanggapan atas potensi ancaman keamanan dari Front Polisario yang didukung oleh Aljazair dan Iran. Kesepakatan normalisasi dengan Israel, memberikan Maroko dukungan diplomatis atas integritasnya di Sahara Barat dan membuka akses untuk memanfaatkan keunggulan militer Israel, dan sektor lainnya. Namun kesepakatan normalisasi tersebut telah meningkatkan ketidakstabilan regional, khususnya ketegangan diplomatis antara Maroko dan Aljazair.

Kata Kunci: Normalisasi, *Front Polisario*, Kebijakan Luar Negeri, Sahara Barat

ABSTRAC

This research aims to analyze the reasons why Morocco normalized its diplomatic relations with Israel in 2020. The normalization agreement brokered by the United States has given Morocco strategic advantages in geopolitical, military, economic and other aspects. On the other hand, Morocco's move has become a controversial topic, because it is related to the historical conflict and political dynamics of Arab countries that oppose Israel. Morocco's normalization agreement with Israel calls for the two countries to officially open access to contacts and resume diplomatic relations

This research uses an explanatory qualitative method, with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, reports, websites and theses. This research uses a behavioral perspective and decision making theory.

The results of this research explain that the normalization agreement between Morocco and Israel is Morocco's rational policy to achieve its national interests, especially regarding the Western Sahara issue. The agreement is a form of response to potential security threats from the Polisario Front which is supported by Algeria and Iran. The normalization agreement with Israel, provides Morocco with diplomatic support for its integrity in Western Sahara and opens access to exploit Israel's military advantages, and other sectors. However, the normalization agreement has increased regional instability, especially diplomatic tensions between Morocco and Algeria.

Keywords: Normalization, Polisario Front, Foreign Policy, Western Sahara

PENDAHULUAN

Normalisasi merupakan istilah yang sering muncul dalam politik internasional. Menurut Barston, normalisasi merupakan suatu proses kepentingan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan atau konflik, serta memberikan resolusi dan pengantar hubungan yang lebih baik.¹

Pada tahun 2020, Israel secara resmi menyepakati normalisasi hubungan diplomatik dengan beberapa negara arab, yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Kesepakatan normalisasi yang dikenal dengan perjanjian *Abraham Accords* tersebut dimediasi dan disponsori oleh pemerintahan Amerika Serikat. Bagi negara-negara Arab, menjalin kesepakatan dengan Israel merupakan tindakan kontroversi, karena berkaitan dengan historis dan dinamika politik negara-negara Arab yang kontra terhadap Israel, sehingga kesepakatan *Abraham Accords* menuai berbagai respon dan kecaman.²

Maroko dan Israel secara resmi menyepakati normalisasi hubungan pada 10 Desember 2020 dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Kesepakatan normalisasi tersebut meminta Maroko untuk menjalin hubungan diplomatik penuh dan meneruskan kontak formal dengan Israel, memberikan izin penerbangan dan

juga membuka akses penerbangan langsung kedua negara, sebagai imbalannya Maroko memperoleh pengakuan AS atas kedaulatan Maroko di Sahara Barat.³

Sebulan sebelum kesepakatan normalisasi Maroko-Israel, pada November 2020, kelompok Polisario kembali menyatakan gencatan senjata telah berakhir dan kembali melakukan perlawanan senjata terhadap pasukan Maroko. Perlawanan tersebut disebabkan oleh kebuntuan politik di kawasan Sahara Barat yang telah berlangsung selama beberapa dekade, serta adanya klaim dari Polisario atas pelanggaran pasukan Maroko di titik perbatasan zona penyangga.⁴

Hubungan yang menghangat antara negara-negara Arab dengan Israel secara garis besar didasari oleh adanya kepentingan keamanan dan ekonomi, yang kemudian menjadi rasionalitas pertimbangan dalam mengambil kebijakan. *Abraham Accords* yang diprakarsai oleh Amerika Serikat menawarkan penawaran yang menggiurkan, sehingga bagi sejumlah negara Arab kesepakatan tersebut layak dipertimbangkan.⁵

¹ R. P Barston, "Modern Diplomacy", Routledge, Fourth Edition, (2014). Hal. 274-280.

² Anna Zakiah Derajat, Toni Kurniawan, "Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Hal. 134.

³ Aljazeera, "Israel, Morocco Agree to Normalise Relations in US-Brokered Deal", <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/10/israel-morocco-agree-to-normalise-relations-in-us-brokered-deal>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

⁴ Houda Chograni, "The Polisario Front, Morocco, and The Western Sahara Conflict, 2021, <https://arabcenterdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-the-western-sahara-conflict>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

⁵ Yulia Rimapradesi, Ahmad Sahide, "Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan

KERANGKA TEORI

Perspektif: Behavioralisme

Behavioralisme adalah salah satu perspektif yang ada dalam studi hubungan internasional. Perspektif behavioralisme memiliki pandangan bahwa hubungan internasional menggambarkan sikap dari para pembuat kebijakan suatu negara, sehingga pola politik luar negeri di suatu negara berkaitan erat dengan para pengambil kebijakan di suatu negara.⁶

Teori: Teori Pengambilan Keputusan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan Model I Aktor Rasional yang dikemukakan oleh Graham Allison. Model I Aktor Rasional menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan berfokus pada unit analisis negara sebagai aktor utamanya, negara bertindak rasional karena negara berupaya mengejar keuntungan dan menghindari kerugian dari setiap kebijakan yang diambilnya.⁷

Allison menjelaskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan aktor rasional dalam mewujudkan tujuan dan kepentingan nasionalnya, yaitu sebagai berikut⁸:

1. National Actor, negara atau pemerintah sebagai aktor utama pengambil kebijakan (*decision maker*) memiliki serangkaian tujuan yang merujuk pada kepentingan nasionalnya.
2. Problem, keputusan yang diambil negara dilatarbelakangi oleh tanggapan atas permasalahan yang ada dalam suatu negara tersebut.
3. Static Selection, negara menentukan keputusan setelah melakukan seleksi terhadap beberapa alternatif yang ada. Pengambil kebijakan akan mengambil pilihan yang paling relevan dengan mempertimbangkan pencarian solusi terbaik bagi suatu masalah atau hal yang paling dibutuhkan oleh negara.
4. Action as Rational Choice, dalam menentukan pilihan yang rasional terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi penentuan kebijakan, yaitu tujuan dan sarana, opsi, konsekuensi, dan pilihan rasional.

Tingkat Analisa: Kelompok

Tingkat analisa merupakan dasar untuk membangun suatu analisis. Dalam studi hubungan internasional, secara garis besar tingkat analisa terbagi atas tingkat sistem, tingkat negara bagian, tingkat kelompok, dan tingkat individu. Penelitian ini berfokus pada tingkat analisa kelompok sebagai komponen penting yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan.⁹ Analisis tingkat kelompok berpandangan bahwa para pengambil kebijakan politik mengacu pada struktur mengacu pada struktur suatu

Israel", *Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 4, No.1, Januari-Juni 2021, Hal. 70.

⁶ M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik", *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2, Februari 2012, Hal. 12-13.

⁷ Graham T. Allison, "Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis", Boston: Little Brown and Company. Dalam Indra Kusumawardhana, "Pengantar Analisis Kebijakan Luar Negeri", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), Hal. 27-29.

⁸ Ibid, Hal. 32-33.

⁹ Carmen Gebhard, "Level of Analysis in International Relations", *E-International Relations*, <https://www.e-ir.info/2022/03/27/level-of-analysis-in-international-relations/>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

pemerintahan, seperti partai politik, organisasi non-pemerintahan, dan kelompok kepentingan yang bertindak atas kepentingan pemerintah dan rakyatnya.¹⁰

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan memahami suatu fenomena yang terjadi, secara lebih mendalam dengan melibatkan variable-variabel yang ada.¹¹ Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menelusuri pembahasan lebih mendalam dan memahami fenomena secara efisien melalui pembentukan hubungan sebab-akibat.¹²

PEMBAHASAN

Maroko dan Israel memiliki hubungan yang naik turun sebelum tahun 2020. Keterlibatan moderat politik Maroko selama konflik Arab-Israel menimbulkan perbedaan pandangan yang lebih radikal terhadap Yahudi di seluruh dunia Arab.¹³ Setelah konflik Arab-Israel mereda pada tahun 1990-an,

hubungan Maroko dan Israel juga turut menghangat. Pada tahun 1994 Maroko memulai hubungan diplomatik tingkat rendah dengan Israel hingga Maroko memutusnya pada tahun 2000, saat peristiwa Intifadah Palestina Kedua.¹⁴

Meskipun hingga 2020, Maroko tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel, kedua negara tersebut tetap mempertahankan hubungan secara rahasia yang mencakup kerjasama intelijen dan perdagangan senjata. Israel menjual sistem militer, sistem komunikasi militer dan sistem kontrol pada Maroko melalui pihak ketiga. Pada tahun 2013, Maroko membeli tiga drone Heron yang diproduksi *Israel Aerospace Industries* (IAI) dengan harga 50 juta USD melalui perantara Perancis.¹⁵

ANCAMAN KEAMANAN MAROKO

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, Maroko memiliki beberapa ancaman keamanan yang mengancam kedaulatannya, terutama mengenai persoalan wilayah Sahara Barat. Diantaranya adalah ancaman

¹⁰ Ibid.

¹¹ Miza Nina Adlini, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Jurnal Edumaspul, Vol. 6, No. 1, 2022, Hal. 974-980.

¹² LP2M, "Eksplanatori Penelitian : Definisi, Karakteristik, dan Jenisnya", 2021, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/28/penelitian-eksplanatori-definisi-karakteristik-dan-jenisnya/> (diakses pada 3 Oktober 2023).

¹³ Ana Salas Cuevas, "A New Era in Israel-Morocco Relations", Universidad de Navarra, 2022, <https://www.unav.edu/web/global-affairs/a-new-era-in-israel-morocco-relations>, (diakses pada 4 Oktober 2023).

¹⁴ Intissar Fakir, "Morocco and Israel Economic Opportunities, Military Incentives, and Moral Hazards", Middle East Institute, <https://www.mei.edu/publications/morocco-and-israel-economic-opportunities-military-incentives-and-moral-hazards>, (diakses pada 9 Oktober 2023).

¹⁵ Jonathan Hemoel, "The Arms Deals Morocco and Israel don't Want you to Know About", 2021, <https://www.haaretz.com/israel-news/2021-03-18/ty-article-opinion/premium/the-arms-deals-morocco-and-israel-dont-want-you-to-know-about/0000017f-e1fb-d804-ad7f-f1fbf4550000> (diakses pada 9 Oktober 2023).

pemberontakan kelompok Polisario, ketegangan dengan Aljazair, serta intervensi Iran.

Pertama, konflik Sahara Barat merupakan persengketaan wilayah antara Kerajaan Maroko dengan kelompok separatis Front Polisario. Kelompok Polisario dibentuk pada tahun 1973, dua tahun sebelum Spanyol meninggalkan wilayah jajahannya di Sahara Barat. Setelah Spanyol gagal memperpanjang masa kolonialisasinya, Front Polisario kemudian mendirikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) dengan maksud untuk memperoleh kedaulatan sendiri di wilayah tersebut. Namun upaya kelompok Polisario untuk memperoleh kemerdekaan terhambat ketika Maroko mengklaim Sahara Barat merupakan bagian dari wilayahnya secara historis.¹⁶

Pada periode 1970-an dan 1980-an, Maroko kemudian terlibat konflik bersenjata dengan kelompok Polisario yang didukung oleh Aljazair. Pada tahun 1988, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan proposal perdamaian untuk mengajukan penentuan nasib sendiri bagi penduduk asli Sahara Barat. Proposal tersebut kemudian disetujui oleh Maroko dan Polisario, sehingga menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1991. Namun, sebelum referendum dilaksanakan, pemerintah Maroko memindahkan ribuan pemukim ke kawasan Sahara Barat agar

diikutsertakan dalam pemungutan suara, sehingga menjadikan referendum tersebut terkendala hingga saat ini.¹⁷

Pada November 2020, sebulan sebelum kesepakatan normalisasi Maroko-Israel, kelompok Polisario menyatakan untuk mengakhiri gencatan senjata yang telah berlangsung 29 tahun dan kembali aktif dalam perjuangan bersenjata melawan Maroko. Berakhirnya kesepakatan gencata senjata tersebut sebagian besar disebabkan oleh ketidakpuasan Polisario terhadap kebuntuan politik yang telah berlangsung puluhan tahun di Sahara Barat. Disisi lain, konflik juga disebabkan oleh adanya insiden di Guerguerat, yang mana pihak Polisario menuduh pasukan Maroko telah melewati batas jalur zona penyangga tersebut.¹⁸

Sejak runtuhnya kesepakatan gencatan senjata pada 13 November 2020, Maroko dan Polisario telah terlibat konfrontasi bersenjata dengan melepaskan tembakan provokatif di sepanjang garis perbatasan. Dua hari kemudian, Polisario mengumumkan konflik berlanjut sengit di tembok pertahanan Maroko yang membelah kawasan Sahara Barat tersebut. Polisario kemudian juga menyatakan

¹⁶ Adnan Adwitama, "Peran Maroko dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (*Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power*)", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 7, No. 3, November 2022, Hal. 176.

¹⁷ Stephen Zunes, "Nationalism and Non-Alignment: The Non-Ideology of the Polisario", *Africa Today* 34, No. 3 (1987), Hal. 33-46.

<https://www.jstor.org/stable/4186427>.

¹⁸ Houda Chograni, "The Polisario Front, Morocco, and The Western Sahara Conflict", 2021, <https://arabcenderdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-the-western-sahara-conflict> (diakses pada 5 Oktober 2023).

bahwa mereka telah memobilisasi “ribuan sukarelawan” untuk turut bergabung dengan Front Polisario.¹⁹ Pada bulan-bulan selanjutnya, pemimpin Front Polisario Brahim Ghali mengumumkan bahwa tentara Sahrawi akan terus menekan kedudukan Maroko di kawasan Afrika barat laut yang menjadi pusat konflik, terkecuali hingga PBB memberikan mandat yang jelas untuk melakukan pemungutan suara penentuan nasib sendiri.²⁰

Kedua, keterlibatan Aljazair dalam persengketaan Sahara Barat telah menegaskan posisinya sebagai pendukung utama Front Polisario. Aljazair menyediakan kamp pengungsi bagi pengungsi Front Polisario, memasok persenjataan, serta mendukung referendum kemerdekaan wilayah Sahara Barat sambil menentang upaya aneksasi yang dilakukan oleh Maroko.²¹ Bagi Aljazair, persengketaan Sahara Barat merupakan upaya untuk menghadang ekspansionisme Maroko. Maroko yang berupaya memperluas wilayahnya secara diplomatis, ekonomi, dan keamanan menimbulkan kekhawatiran bagi pemimpin Aljazair yang kemudian

berusaha membendung persaingan di kawasan tersebut.²²

Pada Mei 2020, pasukan militer Maroko menyatakan akan mendirikan barak militer di Jerada, 38 km dari perbatasan Aljazair. Meskipun militer Maroko menyebutkan bahwa fasilitas tersebut tidak bersifat ofensif, namun media Aljazair secara luas menyatakan upaya tersebut sebagai tindakan provokatif. Sebagai tanggapan terhadap tindakan Maroko tersebut, Aljazair akan membangun dua pangkalan untuk memperkuat pertahanannya di kawasan perbatasan.²³

Pada tanggal 1 November 2020, Aljazair mengadakan referendum populer yang melibatkan 23,7 persen pemilih yang telah memenuhi persyaratan di Aljazair, untuk menyepakati serangkaian peraturan konstitusi, termasuk wewenang bagi Tentara Rakyat Nasional untuk melancarkan intervensi di luar perbatasan Aljazair. Adanya perubahan konstitusi tersebut cenderung meningkatkan kekhawatiran dan kewaspadaan Kerajaan Maroko terhadap rezim pemerintahan Aljazair.²⁴

¹⁹ AFP, “Morocco’s King Warns Polisario after Rivals Clash in W.Sahara”, <https://arab.news/6sxnu> (diakses pada 5 Oktober 2023).

²⁰ Africa News, “Western Sahara: Polisario Front Leader Vows Attacks on Morocco will Continue”, <https://www.africanews.com/2021/10/17/western-sahara-polisario-front-leader-vows-attacks-on-morocco-will-continue/> (diakses pada 5 Oktober 2023).

²¹ Sri Khairunnisa Ariyati, “Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik”, UPH Journal of International Relations, Hal. 34.

²² Intissar Fakir, “Algeria, Morocco, and Western Sahara: Why Tensions, Not Conflict, Has Become the Norm”, 2023, <https://manaramagazine.org/2023/02/algeria-morocco-and-western-sahara-why-tensions-not-conflict-has-become-the-norm> (diakses 5 Oktober 2023).

²³ Michael Tanchum, “The Post-COVID-19 Trajectory for Algeria, Morocco, and Western Sahara”, Instituto Affari Internazionali, 2021, <https://www.jstor.org/stable/resrep28796> (diakses pada 5 Oktober 2023).

²⁴ Ibid.

Ketiga, intervensi Iran dalam persengketaan Maroko dan Polisario di Sahara Barat juga telah meningkatkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Setelah kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2017, Maroko kembali memutusnya pada 1 Mei 2018. Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik tersebut, dengan tuduhan bahwa Iran memberikan dukungan militer dan keuangan kepada Front Polisario melalui kedutaannya di Aljazair dan perwakilan Hizbullah. Ditahun yang sama, Maroko mengklaim bahwa anggota kelompok Polisario telah menggunakan paspor diplomatik Iran, yang diperoleh dari kedutaan Iran di Aljazair untuk ikut serta dalam konferensi internasional. Lebih lanjut, Maroko menyatakan bahwa Hizbullah telah memasok senjata roket SAM-9 dan SAM-11 ke Front Polisario, yang kemudian berujung pada pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran.²⁵

NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK MAROKO DAN ISRAEL

Pada 10 Desember 2020, Maroko dan Israel menyepakati normalisasi hubungan dalam kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, yang menjadikan Maroko sebagai negara Arab keempat yang menjalin hubungan dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir. Dalam kesepakatan tersebut, Presiden AS Donald Trump sepakat untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, wilayah

yang selama puluhan tahun dipersengketakan oleh Maroko dan kelompok Polisario yang didukung oleh Aljazair. Melalui panggilan telepon, Trump menandatangani kesepakatan tersebut dengan Raja Maroko Mohammed VI.²⁶

Pada 22 Desember 2020, Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner dan kepala delegasi Israel, Penasihat Keamanan Nasional Meir Ben-Shabbat bertemu dengan Raja Mohammed VI dan pejabat tinggi lainnya di Maroko untuk menandatangani perjanjian bersama dan melanjutkan komitmen normalisasi. Delegasi tersebut menandatangani deklarasi bersama, yang berjanji untuk membuka penerbangan langsung, meningkatkan kerja sama ekonomi, membuka kembali kantor penghubung, serta mengupayakan hubungan diplomatik penuh yang damai dan bersahabat.²⁷

Normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel pada tahun 2020 merupakan salah satu bentuk reaksi Maroko terhadap ancaman dan permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan teori yang dikemukakan Allison, dalam konteks normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel, dapat dijelaskan bahwa negara atau pemerintah Maroko merupakan aktor utama (*national actor*) dalam pengambilan setiap kebijakan negaranya.

²⁶ Aljazeera, Ibid.

²⁷ Joseph Krauss, "Kushner Joins Israelis on Landmark Visit to Morocco", 2020, <https://apnews.com/article/donald-trump-bahrain-israel-iran-nuclear-united-arab-emirates-2f6ac417bc0efb2f2c80f6d4e1eeb34> (diakses pada 15 Oktober 2023).

²⁵ Banafsheh Keynough, "Revolutionary Iran's Africa Policy", King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Juni 2021, Hal. 93.

Keputusan Maroko menyepakati normalisasi dengan Israel merupakan suatu pengambilan keputusan rasional dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya terkait permasalahan yang ada di Sahara Barat.²⁸

Keputusan Maroko dalam kesepakatan normalisasi hubungannya dengan Israel didasari oleh adanya ancaman keamanan (*problem*) yang mengancam kedaulatan Maroko. Maroko memiliki permasalahan utama terkait persengketaan di kawasan Sahara Barat. Kembalinya Polisario dalam operasi bersenjata, serta adanya intervensi dari Aljazair dan Iran dalam persengketaan Sahara Barat, telah menimbulkan kekhawatiran dan kewaspadaan Maroko. Dengan menjalin kerjasama dengan Israel, merupakan implementasi dari (*static selection*), dimana Maroko akan memperoleh keuntungan strategis dari kemampuan militer Israel yang memadai. Maroko akan memandang kerjasama militernya dengan Israel merupakan potensi untuk mencegah agresi dari Front Polisario dan pada tingkat yang didukung oleh Aljazair dan Iran.²⁹

Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan militer dan pertahanan, hubungan militer Maroko dan Israel telah berkembang pesat setelah adanya hubungan formal antara kedua negara tersebut. Maroko telah melakukan transaksi senilai 1,2 miliar USD untuk membeli peralatan militer Israel

antara 2020-2022. Pembelian tersebut mencakup drone Harop, Sistem Pertahanan Udara *Skylock Dome*, 150 drone mini (UAS Wander B-VTOL), sistem rudal Barak-8.³⁰

Adapun konsekuensi dari kesepakatan normalisasi tersebut, selain menerima kecaman dan tanggapan yang pro dan kontra, kesepakatan normalisasi Maroko-Israel juga menimbulkan dampak pada stabilitas regional, dimana meningkatnya kekhawatiran dan permusuhan Aljazair terhadap Maroko karena kehadiran Israel di kawasan.³¹ Disisi lain, kesepakatan normalisasi Maroko dan Israel cenderung telah mengabaikan persoalan Palestina dan melemahkan konsensus lama dan resolusi negara Arab yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya dapat diberikan sebagai imbalan setelah adanya konsesi dalam proses perdamaian.³²

KESIMPULAN

Pada tanggal 10 Desember 2020, Maroko resmi menyepakati normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Dalam kesepakatan tersebut, Maroko berjanji akan membuka akses kontak secara resmi dan melanjutkan hubungan diplomatik, sesuai dengan yang tertuang dalam deklarasi perjanjian. Maroko menjadi negara Arab keenam yang menjalin hubungan dengan Israel, menyusul Mesir, Yordania, Bahrain, UEA, dan Sudan.

²⁸ Government Defence Integrity Index, "Morocco", 2020, *Transparency International Defence & Security*.

²⁹ Intissar Fakir, "Morocco and Israel Economic Opportunities, Military Incentives, and Moral Hazards", Op. Cit.

³⁰ The Database of Israeli Military and Security Export, "Morocco", DIMSE, <https://dimse.info/morocco/#f+10785+16>.

³¹ Intissar Fakir, Op. Cit.

³² Joseph Krauss, Ibid.

Rasionalisasi Maroko dalam kesepakatan tersebut berkaitan dengan upaya Maroko untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan nasional tersebut ialah pencarian solusi terhadap ketidakstabilan dan persengketaan kedaulatan Maroko di kawasan Sahara Barat yang telah lama dipersengketakan. Kesepakatan normalisasi juga merupakan bentuk tanggapan dari pemerintahan Maroko terhadap adanya ancaman dan permasalahan di Sahara Barat, khususnya ancaman dari kelompok Polisario, ketegangan dengan Aljazair, serta intervensi Iran. Dengan menjalin kerjasama dengan Israel, Maroko dapat memperoleh dukungan politik dan meningkatkan militer serta pertahanannya sebagai potensi pencegah agresi dari kelompok Polisario yang didukung oleh Aljazair dan Iran.

Disisi lain, kesepakatan normalisasi Maroko-Israel juga menimbulkan eskalasi ketegangan regional antara Maroko dan Aljazair. Selain hubungan dengan Maroko yang naik turun, Aljazair memandang penerimaan Israel di Afrika Utara secara tidak langsung merupakan suatu ancaman eksternal bagi pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barston, R.P, "Modern Diplomacy", Routledge, Fourth Edition, (2014).

T. Allison, Graham, "Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis", Boston: Little Brown and Company. Dalam Indra Kusumawardhana, "Pengantar Analisis

Kebijakan Luar Negeri", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).

Jurnal:

Adwitama, Adnan, "Peran Maroko dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (*Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power*)", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 7, No. 3, November 2022, Hal. 173-180.

Ariyati, Sri Khairunnisa, "Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik", UPH Journal of International Relations, Hal. 30-40.

Nina Adlini, Miza, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Jurnal Edumaspul, Vol. 6, No. 1, 2022, Hal. 974-980.

Rimapradesi, Yulia, Sahide, Ahmad, "Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel", Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 4, No.1, Januari-Juni 2021, Hal. 67-84.

Saeri, M, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik", Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Februari 2012, hal. 1-19.

Zakiah Derajat, Anna, Kurniawan, Toni, "Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Hal. 133-149.

Zunes, Stephen, "Nationalism and Non-Alignment: The Non-Ideology of the Polisario", *Africa Today* 34, No. 3 (1987), Hal. 33-46. <https://www.jstor.org/stable/4186427>.

Laporan:

Fakir, Intissar, "Algeria, Morocco, and Western Sahara: Why Tensions, Not Conflict, Has Become the Norm", 2023, <https://manaramagazine.org/2023/02/algeria-morocco-and-western-sahara-why-tensions-not-conflict-has-become-the-norm> (diakses 5 Oktober 2023).

Fakir, Intissar, "Morocco and Israel Economic Opportunities, Military Incentives, and Moral Hazards", Middle East Institute, <https://www.mei.edu/publications/morocco-and-israel-economic-opportunities-military-incentives-and-moral-hazards>, (diakses pada 9 Oktober 2023).

Keynoush, Banafsheh, "Revolutionary Iran's Africa Policy", King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Juni 2021, Hal. 93.

Michael Tanchum, "The Post-COVID-19 Trajectory for Algeria, Morocco, and Western Sahara", *Instituto Affari Internazionali*, 2021, <https://www.jstor.org/stable/resrep28796> (diakses pada 5 Oktober 2023).

Website:

AFP, "Morocco's King Warns Polisario after Rivals Clash in W.Sahara",

<https://arab.news/6sxnu> (diakses pada 5 Oktober 2023).

Africa News, "Western Sahara: Polisario Front Leader Vows Attacks on Morocco will Continue", <https://www.africanews.com/2021/10/17/western-sahara-polisario-front-leader-vows-attacks-on-morocco-will-continue/> (diakses pada 5 Oktober 2023).

Aljazeera, "Israel, Morocco Agree to Normalise Relations in US-Brokered Deal", <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/10/israel-morocco-agree-to-normalise-relations-in-us-brokered-deal>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

Chograni, Houda, "The Polisario Front, Morocco, and The Western Sahara Conflict, 2021, <https://arabcenderdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-the-western-sahara-conflict/>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

Cuevas, Ana Salas, "A New Era in Israel-Morocco Relations", *Universidad de Navarra*, 2022, <https://www.unav.edu/web/global-affairs/a-new-era-in-israel-morocco-relations>, (diakses pada 4 Oktober 2023).

Gebhard, Carmen, "Level of Analysis in International Relations", *E-International Relations*, <https://www.e-ir.info/2022/03/27/levels-of-analysis-in-international-relations>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

Government Defence Integrity Index,
“Morocco”, 2020,
Transparency International
Defence & Security.

<https://dimse.info/morocco/#f+10785+16>.

Hempel, Jonathan, “The Arms Deals
Morocco and Israel don’t
Want you to Know About”,
2021,
<https://www.haaretz.com/israel-news/2021-03-18/ty-article-opinion/.premium/the-arms-deals-morocco-and-israel-dont-want-you-to-know-about/0000017f-e1fb-d804-ad7f-f1bf4550000>
(diakses pada 9 Oktober 2023).

Houda Chograni, “The Polisario
Front, Morocco, and The
Western Sahara Conflict”,
2021,
<https://arabcenderdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-the-western-sahara-conflict> (diakses pada 5 Oktober 2023).

Krauss, Joseph, “Kushner Joins
Israelis on Landmark Visit to
Morocco”, 2020,
<https://apnews.com/article/donald-trump-bahrain-israel-iran-nuclear-united-arab-emirates-2f6ac417bc0efb2f2c80f6d4e1eeb34> (diakses pada 15 Oktober 2023).

LP2M, “Eksplanatori Penelitian :
Definisi, Karakteristik, dan
Jenisnya”, 2021,
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/28/penelitian-eksplanatori-definisi-karakteristik-dan-jenisnya/> (diakses pada 3 Oktober 2023).

The Database of Israeli Military and
Security Export, “Morocco”,
DIMSE,